

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG	5
A. Pelayanan Informasi	5
B. Penguatan Kapasitas	20
C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi	22
BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	23
A. Aplikasi	23
B. Website	23
BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET	24
BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER	25
BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN	26
BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	27
BAB VIII REKOMENDASI	28
BAB IX PENUTUP	29

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Divisi Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 telah selesai dan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Meski di sana sini masih terdapat banyak kekurangan namun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah berusaha sekuat tenaga guna melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik pada tahun 2022.

Kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam pelaksanaan informasi publik yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Laporan Akhir Divisi Data dan Informasi ini merupakan tanggungjawab dan amanah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Divisi Data dan Informasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami berharap apa yang telah kami susun sebagai laporan ini dapat menjadikan proses Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menjadi lebih baik. Akhirnya marilah kita bersama berdoa kepada Allah SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk serta kekuatan dalam melaksanakan tugas yang telah Allah titipkan kepada kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023

Divisi Data dan Informasi
Bawaslu Provinsi Lampung

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung merupakan salah satu badan publik yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, dikarenakan lembaga ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggara negara, mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Lampung harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Teknologi dan sistem informasi yang komprehensif merupakan keniscayaan untuk diimplementasikan pada era digital saat ini. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, sistem informasi yang handal diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam mengawal pengelolaan lembaga yang bersih, profesional dan berwibawa, serta berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga.

Laporan layanan informasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Lampung. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Lampung terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan pelayanan informasi. Hal itu dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi. Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Lampung dilakukan terhadap aspek pelayanan informasi, koordinasi dan penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi Lampung serta pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

A. Pelayanan Informasi

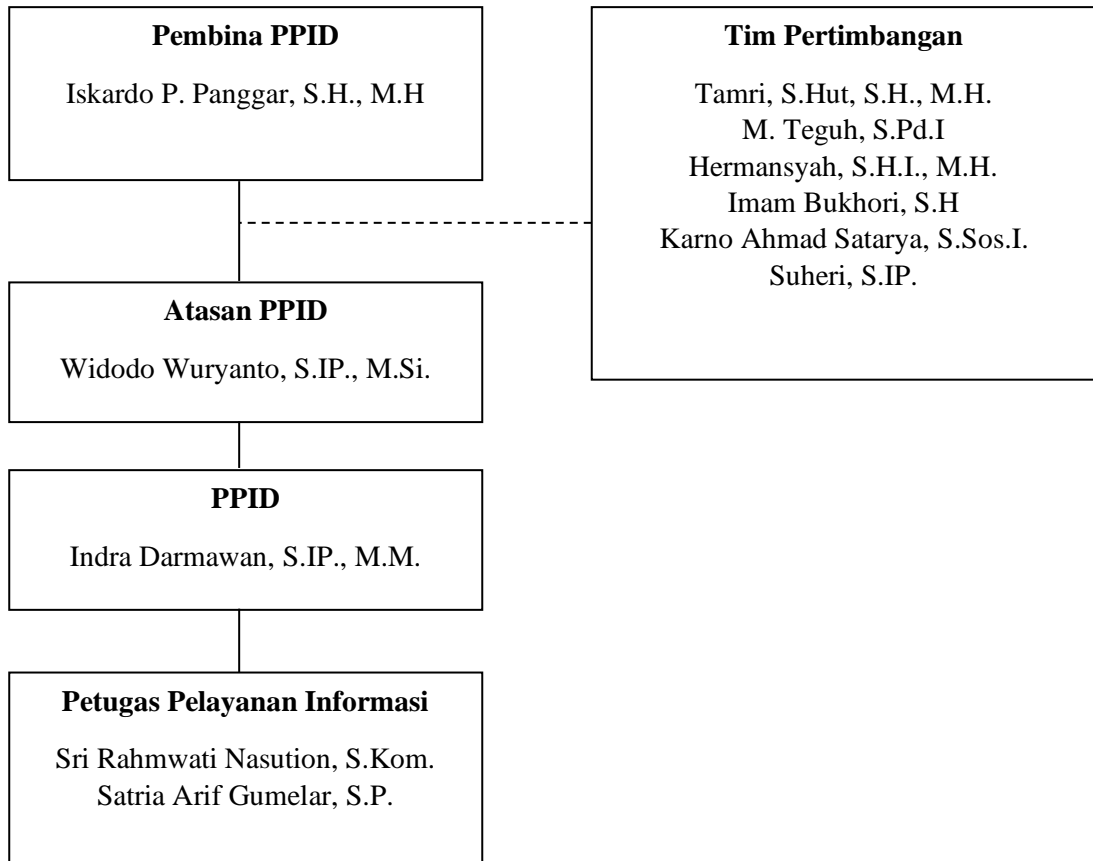
Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Lampung terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan pelayanan informasi. Hal itu dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi. Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Lampung dilakukan terhadap aspek pelayanan informasi, koordinasi dan penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi Lampung serta pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.

Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Lampung telah membuat struktur PPID sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2022 mengalami sedikit perubahan dari struktur PPID pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan struktur komisioner dan kepemimpinan di Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022. Bagan Struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah merencanakan beberapa program dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung, secara keseluruhan program-program tersebut telah terealisasi meskipun masih butuh pengembangan dan perbaikan dalam pelaksanaannya di waktu yang akan datang. program-program tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan konsolidasi persiapan aplikasi e-PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung
2. Supervisi dan monitoring pengaplikasian e-PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung
3. Penguatan SDM pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung

4. Sosialisasi PPID dan tata cara permohonan data kepada masyarakat



Gambar 2.1. Bagan Struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah memiliki ruang kerja yang diperuntukkan sebagai ruang pelayanan PPID. Ruangan PPID ini terdiri dari alat pendukung seperti komputer, Printer, perangkat kerja kantor, meja pelayanan informasi, banner dan pendukung lainnya. Ruangan PPID juga disertai dengan alur permohonan informasi publik dan permohonan informasi Pemilu dan Pemilihan. Selain itu Bawaslu Provinsi juga telah membuat Daftar Informasi Publik serta memerintahkan seluruh Kabupaten/Kota untuk membuat Daftar Informasi Publik. Berikut merupakan daftar informasi public Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2022 :

Tabel 2.1. Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Lampung

No.	Judul Informasi	Pejabat yang Menguasai/Menyimpan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format yang ada		Keterangan	
				cetak	online		
INFORMASI BERKALA							
1	Profil Singkat Pimpinan	ADM	2020		v		
2	Struktur Organisasi	ADM	2020		v		
3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Lampung tahun 2019	ADM	2019		v		
4	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Lampung tahun 2018	ADM	2018		v		
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Lampung tahun 2017	ADM	2017		v		
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Lampung tahun 2020	ADM	2020		v		
6	Laporan Keuangan Tahun 2017	ADM	2017		v		
7	Laporan BMN Bawaslu Lampung 2018	ADM	2018		v		

8	Laporan BMN 2016	ADM	2016	v		
9	Laporan BMN 2017	ADM	2017	v		
	Laporan BMN 2020	ADM	2020	v		
10	Laporan BMN 2021 Semester 1	ADM	2020	v		
11	Laporan Tahunan Layanan Informasi 2019	HUMAS	2019	v		
12	DIP 2020	HUMAS	2020	v		
13	DIP 2019	HUMAS	2019	v		
14	Ringkasan Laporan Layanan Informasi Berdasarkan Alasan Penolakan Tahun 2019	HUMAS	2019	v		
15	Ringkasan Laporan Layanan Informasi Berdasarkan Waktu Pelayanan Tahun 2019	HUMAS	2019	v		
16	Ringkasan Laporan Layanan Informasi Berdasarkan Jumlah Permohonan Tahun 2019	HUMAS	2019	v		
17	Hasil Pengawasan Hari H, Masa Tenang, Kampanye Pilkada 2018	pengawasan	2018	v		
18	Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	pengawasan	2018	v		

19	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota 2018	pengawasan	2018	v		
20	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota 2018	pengawasan	2018	v		
21	Hasil pemetaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pilkada 2018	pengawasan	2018	v		
22	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2014	pengawasan	2014	v		
23	RKA Bawaslu Lampung 2020	ADM	2020	v		
24	Laporan Keuangan Tahun 2018	ADM	2018	v		
25	DIPA 2019	ADM	2019	v		
26	DIPA 2020	ADM	2020	v		
27	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2019	sengketa	2019	v		
28	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.	pengawasan	2019	v		
29	Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019 per 7 Desember 2018.	pengawasan	2018	v		
30	Hasil Pengawasan DPT Pemilu 2019.	pengawasan	2019	v		

31	Hasil Pengawasan Hari H, Masa Tenang, Kampanye Pilkada 2018.	pengawasan	2018	v			
32	Hasil pemetaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pilkada 2018.	Pengawasan	2018	v			
33	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2014.	pengawasan	2014	v			
34	Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Bawaslu 2020	ADM	2020	v			
35	Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020	ADM	2020	v			
36	Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021	ADM	2021	v			
37	Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Tahun 2018	pengawasan	2018	v			
38	SK PPID	HUMAS	2020	v			
39	Data Pegawai Pegawai Negeri Bawaslu Lampung 2020	ADM	2020	v			
40	Data Pegawai Pegawai Negeri Bawaslu Lampung 2021	ADM	2021	v			

41	Laporan Akhir Pemilihan Pileg dan Pilpres dan Pilgub Tahun 2014	ADM	2014	v		
42	RKA Bawaslu Lampung 2017	ADM	2017	v		
43	RKA Bawaslu Lampung 2018	ADM	2018	v		
44	DIPA 2017	ADM	2017	v		
45	DIPA 2018	ADM	2018	v		
46	Laporan Laporan Layanan Informasi Publik Provinsi Lampung Tahun 2019	Datin	2019	v		
47	Laporan Laporan Layanan Informasi Publik Provinsi Lampung Tahun 2020	Datin	2020	v		
48	SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024	ADM	2020	v		
49	Perjanjian Kerja Ketua Kasek sama Kabag	ADM	2020	V		
50	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun 2021	ADM	2021	V		
51	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022	ADM	2022	V		
52	DIPA Tahun 2022	ADM	2022	V		
53	SK Penetapan DIP dan DIP Tahun 2022	Datin	2022	V		

INFORMASI SERTA MERTA

INFORMASI SERTA MERTA							
54	Hasil Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	2019		v		
55	Hasil Pengawasan Penyampaian dan Gambaran Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Umum 2019	Pengawasan	2019		v		
56	Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019 per 7 Desember 2018	Pengawasan	2018		v		
57	Data Hasil Pengawasan Bakal Calon Legislatif 2019	Pengawasan	2019		v		
58	Data Pengawasan Pendaftaran Calon Pemilu 2019 Per 16 Juli 2018	Pengawasan	2018		v		
59	Data Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan 2018 untuk Perbaikan Prosedur Penyelenggaraan Pemilu 2019	Pengawasan	2019		v		
60	Data Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara 27 Juni 2018.	pengawasan	2018		v		

61	Data Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan 2018 untuk Perbaikan Prosedur Penyelenggaraan Pemilu 2019.	Pengawasan	2019	v			
62	Data Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara 27 Juni 2018.	pengawasan	2018	v			
63	Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.	pengawasan	2018	v			
64	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota 2018.	pengawasan	2018	v			
65	Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018	sengketa	2018	v			
66	SOP Klasifikasi Informasi	HUMAS	2020	v			
67	SOP Pelayanan Informasi	HUMAS	2020	v			
68	SOP Pelayanan Keberatan informasi	HUMAS	2020	v			
69	SOP Pendokumentasian Informasi di Kecualikan	HUMAS	2020	v			

70	SOP Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung	HUMAS	2020	v			
71	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	HUMAS	2020	v			
72	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik Provinsi Lampung	HUMAS	2020	v			
73	Standar Biaya Perolehan Informasi	HUMAS	2020	v			
74	Rekap Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018	sengketa	2018	v			
75	Rekapitulasi Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Penanganan Pelanggaran	2020	v			
76	Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Penanganan Pelanggaran	2020	v			
77	Putusan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019	Penanganan Pelanggaran	2019	v			
78	Tata Cara Pengajuan Sengketa Proses Pemilihan	sengketa	2020	v			
79	Rekap Jumlah Perkara Penyelesaian Sengketa Provinsi Lampung Tahun 2020	sengketa	2020	v			

80	Data SDM Pengawas tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS pada PILKADA 2020	SDM	2020	v			
81	Daftar Pemilih Tetap pada PILKADA 2020	pengawasan	2020	v			
82	Syarat Dukungan Parpol Pasangan Calon pada PILKADA 2020	pengawasan	2020	v			
83	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada PILKADA 2020	pengawasan	2020	v			
84	Rekapitulasi Suara pada PILKADA 2022	pengawasan	2020	v			
85	Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon Perseorangan pada PILKADA 2020	pengawasan	2020	v			
86	Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran pada PILKADA 2020	Penanganan Pelanggaran	2020	v			
87	Data Permohonan Sengketa pada PILKADA 2020	sengketa	2020	v			
88	Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada PILKADA 2020	Penanganan Pelanggaran	2020	v			

89	SDM Pengawas tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS pada Pemilu 2019	SDM	2019	v			
90	Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019	pengawasan	2019	v			
91	Rekapitulasi Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Presiden pada Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v			
92	Rekapitulasi Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil masing-masing pada Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v			
93	Rekapitulasi Suara Calon Anggota Legislatif DPD RI Dapil masing-masing pada Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v			
94	Rekapitulasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi masing-masing pada Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v			
95	Data Keterwakilan 30% Perempuan pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota legislatif DPRD Provinsi masing-masing Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v			

96	Data Laporan Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v		
97	Data Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu 2019	Penanganan Pelanggaran	2019	v		
98	Data Permohonan Sengketa pada Pemilu 2019	sengketa	2019	v		
99	Data Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2019	Pengawasan	2019	v		
INFORMASI SETIAP SAAT						
100	Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam Tahun 2020	ADM	2020	v		
101	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019	pengawasan	2019	v		
102	Himpunan Perbawaslu Sengketa	sengketa	2020	v		
103	Informasi pengadaan barang dan jasa	ADM	2022	v		
104	Informasi publik yang dikecualikan	Datin	2022	v		

Selama tahun 2022, Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima 1 (satu) permohonan data dan informasi dari masyarakat secara daring melalui website PPID Bawaslu Provinsi Lampung yang mana semua data yang diminta telah diberikan seluruhnya sesuai permohonan pemohon. Dalam memenuhi permintaan informasi publik yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Lampung, waktu yang diperlukan adalah 1 (satu) hari. Pemenuhan permintaan informasi publik tersebut



Gambar 2.2. Ruang PPID Bawaslu Provinsi Lampung

terbilang cepat karena data yang diminta sudah dimiliki dan dikuasai oleh PPID Bawaslu Provinsi Lampung. Dari permohonan informasi publik yang di ajukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Lampung selama tahun 2022, semua permintaan dan permohonan informasi publik diberikan dan dikabulkan seluruhnya kepada pemohon dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi publik dan sudah tersedia dan masuk ke dalam Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2022. Adapaun rincian jumlah permohonan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Daftar Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Lampung
Tahun 2022

No	Nomor Registrasi	Data yang diminta	Keperluan	Status
1.	001/LA.PPID/10/2022	Laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2021	Skripsi	Diberikan Seluruhnya

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah berusaha memberikan terobosan-terobosan yang dapat mempermudah pelayanan data dan informasi bagi masyarakat di masa pandemi sehingga masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tidak harus datang ke kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Terobosan tersebut berupa pengintegrasian website PPID Bawaslu Provinsi Lampung dengan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sehingga permohonan informasi yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilihat dan diketahui oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Hasil dari komitmen Bawaslu Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan informasi publik serta peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Lampung mendapatkan predikat “Informatif” melalui Pemingkatan pelayanan informasi publik serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Capaian predikat informatif tersebut dapat dipertahankan oleh Bawaslu Provinsi Lampung selama dua tahun berturut – turut dari tahun 2021.

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Lampung juga mengikuti penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung dan mendapatkan anugrah penghargaan dengan kategori “Badan Publik yang Patuh menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik”.

B. Penguatan Kapasitas

Dalam mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung maka pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) orang staf yang menangani pelayanan informasi publik. Sesuai dengan Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 semua staf kehumasan bertanggung jawab menjadi petugas pelayanan informasi yang bertugas untuk melayani permohonan informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
2. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi
3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID

Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur berupa rapat dan sosialisasi, bimbingan teknis, serta supervisi dan monitoring beserta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung. Berikut merupakan kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka penguatan kapasitas pelayan informasi publik :

1. Bimbingan Teknis dan Pengenalan User Interface website Bawaslu se-Provinsi Lampung

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 03 Juni 2022. Peserta kegiatan yang hadir yaitu staf PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung sebanyak 15 (lima belas) orang. Kegiatan ini lakukan guna optimalisasi penggunaan website dalam pengelolaan konten dan isi website sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.



Gambar 2.3. Bimbingan Teknis dan Pengenalan User Interface website Bawaslu se-Provinsi Lampung

2. Rapat Evaluasi PPID dan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu se-Provinsi Lampung Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 02 Desember 2022. Peserta kegiatan yang hadir yaitu staf PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung sebanyak 15 (lima belas) orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.



Gambar 2.4. Rapat Evaluasi PPID dan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Lampung

C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi

Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Lampung belum masuk dalam jajaran Bawaslu Provinsi yang menggunakan ePPID terintegrasi seluruh Indonesia. Namun, Bawaslu Provinsi Lampung telah menggunakan PPID terintegrasi se-Provinsi Lampung. Hal ini memungkinkan Bawaslu Provinsi untuk dapat mengetahui permohonan data yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Aplikasi

Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Lampung belum mengembangkan aplikasi untuk pelayanan informasi selain PPID terintegrasi. Selebihnya Bawaslu Provinsi Lampung hanya menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak swasta seperti Google Drive untuk penyimpanan data dan aplikasi perkantoran standar yang biasa digunakan di kantor. Akan tetapi staf data dan informasi diberikan tanggung jawab juga untuk menjadi operator bagi aplikasi buatan Bawaslu/KPU seperti Webmail bawaslu, Sigap Lapor, Sipol, Silon dan lain sebagainya.

B. Website

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) website yang masih aktif hingga saat ini, yaitu website utama dengan alamat url : lampung.bawaslu.go.id serta website PPID dengan alamat url : ppid.lampung.bawaslu.go.id kedua website tersebut pengembangannya berada dalam tanggung jawab divisi data dan informasi, akan tetapi untuk penggunaannya, website utama diserahkan kepada divisi humas.



Gambar 3.1. Tampilan Halaman Awal Website Utama Bawaslu Provinsi Lampung

BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Pada tahun 2022 kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung berpindah lokasi dari tahun sebelumnya, hal tersebut membuat Bawaslu Provinsi Lampung harus melakukan pemasangan ulang terhadap jaringan internet agar segala pekerjaan yang membutuhkan jaringan internet dapat berjalan dengan sepatutnya. Divisi data dan informasi dalam hal tersebut melakukan mapping kebutuhan jaringan dan pemasangan jaringan internet baru di kantor yang baru. Hal itu diperlukan karena kebutuhan kantor yang baru jauh lebih besar dibandingkan dengan kantor yang lama sehingga membutuhkan jaringan yang menyebar keseluruh ruangan yang ada. Pada tahun 2022 kami menggunakan jaringan internet dari Provider Indonesia Trans Network dengan spesifikasi jaringan jenis Dedicated 1:1 dan Bandwidth sebesar 30Mbps. Selain itu di beberapa device yang membutuhkan kecepatan internet yang stabil, disediakan kabel LAN sehingga jaringan internet tidak mudah terganggu dengan pengguna yang banyak dan cuaca yang buruk.

Pemeliharaan jaringan internet dilakukan sesuai kebutuhan yang ada atau jika ada masalah dengan jaringan internet. Hal tersebut dilakukan dengan menghubungi contact layanan yang diberikan oleh provider internet. Selama tahun 2022 Bawaslu Provinsi Lampung pernah melakukan Pengembangan jaringan internet, hal tersebut dilakukan dengan menambah router agar dapat menjangkau beberapa titik yang tidak terjangkau dengan router dari provider. Namun, sampai saat ini masih ada ruangan yang belum memiliki router sendiri.

BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Kebersihan dan Keamanan Siber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dan/atau sistem jaringan dari berbagai ancaman atau akses ilegal, kebersihan dan keamanan siber mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Upaya perlindungan ini dilakukan pada perangkat komputasi, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan serta disimpan di lingkungan siber.

Pada prinsipnya kebersihan dan keamanan siber di Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih bergantung kepada Pusdatin Bawaslu Republik Indonesia. Kebijakan serta alat-alat keamanan siber yang melindungi server tempat website Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih berada di Pusdatin Bawaslu RI. Jika ada masalah perestasan atau gangguan server ataupun system, kami langsung berkoordinasi dengan tim dari Pusdatin untuk melihat akar masalah dan meminta bantuan untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian, Bawaslu Provinsi Lampung tetap melakukan upaya kebersihan dan keamanan siber dengan melakukan pencegahan melalui penggantian password semua akun website secara berkala, mengunci *wifi* kantor dengan password, mensosialisasikan agar perangkat dan jaringan kantor tidak digunakan untuk membuka situs-situs yang tidak aman, serta menginstruksikan jajaran Bawaslu Kabupaten.Kota untuk melakukan pencegahan yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko masuknya malware melalui jaringan dan website yang dikelola.

BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN

Berdasarkan anggaran Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022, alokasi yang dianggarkan kepada PPID sebesar Rp 123.540.000. Berikut jumlah dan nilai realisasi yang dianggarkan berdasarkan agenda dan program kegiatan PPID selama tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Lampung:

Tabel 6.1. Anggaran dan Realisasi Program Divisi Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung

No.	Jenis Program Kegiatan	Agenda	Nilai Anggaran	Realisasi
1	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Provinsi	Rapat Biasa	Rp 35.290.000	Rp. 33.000.000
		Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu		
2	Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi publik	Rapat Biasa	Rp 88.250.000	Rp 83.600.846
	Jumlah		Rp. 123.540.000	Rp. 116.600.846

BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Sebagai divisi yang baru berdiri sendiri, tentunya masih sangat banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh divisi data dan informasi, tidak terkecuali di tahun 2022 ini, berikut adalah daftar inventarisir tantangan dan permasalahan di divisi data dan informasi selama tahun 2022 :

A. Tantangan dan Permasalahan Internal

1. Berlakunya Perbawaslu Pola Hubungan Bawaslu sampai ke tingkat Kabupaten/Kota membuat jajaran staf di Bawaslu Kabupaten Kota mengalami pergantian, hal ini membuat pola koordinasi dan komunikasi ke staf data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota harus menyesuaikan kembali dengan jajaran staf dan kordiv yang baru
2. SDM yang kurang baik dalam jumlah maupun kapasitas. Bawaslu Provinsi Lampung hanya memiliki 2 (dua) staf Data dan Informasi yang pada pelaksanaannya harus mengerjakan segala urusan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi mulai dari kelancaran jaringan Wifi, penggunaan alat *video conference* hingga gangguan gangguan peretasan yang terjadi di akun-akun milik Bawaslu Provinsi Lampung.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Sampai saat ini divisi data secara khusus belum memiliki printer dan alat scanner sendiri dan masih menggunakan alat milik divisi hukum dan bagian administrasi.
4. Anggaran yang sangat terbatas membuat tidak memungkinkannya divisi data dan informasi Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengadakan bimtek peningkatan kapasitas dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang data dan informasi serta melakukan monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Tantangan dan Permasalahan Eksternal

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait PPID membuat kurangnya minat masyarakat menggunakan fasilitas yang ada, hal ini berdampak pada fungsi PPID yang belum terlaksana seperti seharusnya

BAB VIII REKOMENDASI

Dalam menyikapi tantangan dan permasalahan yang ada di Bawaslu Provinsi Lampung terkait pelayanan dan pengelolaan data dan informasi, maka Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Perlu ada lebih banyak kegiatan bimbingan teknis untuk staf yang mengelola data dan informasi agar kurangnya jumlah personil dapat sedikit ditutupi dengan kapasitas terkait data informasi yang lebih baik.
2. Perlu ada lebih banyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan informasi melalui PPID sehingga masyarakat lebih memahami keberadaan dan fungsi PPID yang ada di setiap instansi, khususnya di Bawaslu Provinsi Lampung.
3. Perlu ada penambahan anggaran untuk memaksimalkan peran PPID yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya terkait sarana dan prasarana PPID.

BAB IX PENUTUP

Demikian laporan akhir Divisi Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai salah satu tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung atas kerja-kerja Divisi Data dan Informasi yang telah dilakukan, sebagai bahan evaluasi dan bahan tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang berkaitan dengan Divisi Data dan Informasi.

Selanjutnya kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu kritik, saran, dan bimbingan dari Bawaslu Republik Indonesia sangat kami harapkan dalam menghadapi tahapan dan kegiatan berikutnya. Dan semoga laporan akhir ini dapat memberikan gambaran secara umum terhadap pelaksanaan fungsi Divisi Data dan Informasi tahun 2022. Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.